

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		<p>2. Lampiran Perhitungan</p>	<p>E. Sistem APAR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian sistem APAR meliputi penjelasan berikut ini : <ol style="list-style-type: none"> a. Sifat bahaya kebakaran, jenis APAR dan ukurannya. b. Kriteria jumlah APAR. c. Jarak pemasangan antar APAR. <p>F. Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Aktif lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian penjelasan tentang bahan/zat aktif yang digunakan dan alasan penggunaannya. 2. Uraian penjelasan cara pelepasannya. 3. Pembagian zona dan batas ruang yang dilindungi. 4. Kriteria tekanan desain pada nozzle pelepasan. 5. Referensi tata cara perencanaan yang digunakan. <p>A. Sistem Pipa Tegak Hidran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis perhitungan jarak-jarak untuk pilar hidran kota dan/atau pilar hidran halaman. 2. Analisis perhitungan jumlah pipa tegak gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi dan luas per lantai gedung. 3. Analisis penempatan katup sambungan pemadam kebakaran (<i>siamesse connection</i>). 4. Analisis jenis saf kebakaran yang harus tersedia : smoke vestibule, lift dan tangga berdasarkan dalamnya basemen paling bawah dan/atau tinggi gedung. 5. Analisis jangkauan luas (<i>coverage area</i>) katup landing di saf kebakaran. 6. Analisis cadangan air meliputi kapasitas cadangan air dan lokasi tanki penyimpanannya. 7. Analisis dan perhitungan penentuan dimensi pipa tegak (secara hidrolik atau secara skedul pipa). 8. Analisis dan perhitungan alat-alat penurunan tekanan (<i>pressure reducing valve dan/atau orifice plate</i>). 9. Analisis dan perhitungan tekanan (<i>head</i>) pompa kebakaran (<i>fire pumps</i>). 10. Kelengkapan Kotak KSSK (Katup Sambungan Selang Kebakaran) Gedung (<i>Fire Hose Cabinet</i>). 11. Spesifikasi Sambungan dengan Petugas Pemadam Kebakaran pada katup landing dan siamesse. <p>B. Sistem Sprinkler Otomatis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan hidrolik pipa dilengkapi dengan sketsa pemipaan. 2. Analisis Jarak antar kepala sprinkler sesuai dengan tingkat bahaya dilengkapi dengan sketsa jangkauan area (<i>coverage area</i>) sprinkler. 3. Analisis dan perhitungan untuk penentuan ukuran pipa pembagi utama, pipa pembagi, pipa cabang. 4. Analisis dan perhitungan alat-alat penurunan tekanan (<i>pressure reducing valve dan/atau orifice plate</i>). 5. Analisis dan perhitungan tekanan (<i>head</i>) yang diperlukan. <p>C. Sistem Pompa Pemadam Kebakaran (<i>Fire pumps set</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Pompa Kebakaran dan Pompa Jockey yang dilengkapi dengan kurva Pompa yang menjelaskan Kondisi Desain, Churn Pressure, Extended Flow – lengkapi dengan sketsa menggunakan kurva dari fabrikasi pompa (<i>brand-name dan/atau merk harus dihapus</i>). 2. Analisis dan perhitungan kebutuhan penyediaan daya listrik untuk pompa kebakaran. <p>D. Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Aktif lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dan perhitungan kebutuhan bahan/zak aktif.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		3. Gambar-Gambar Perencanaan	<p>2. Perhitungan sisa volume bahan/zat aktif pada pipa.</p> <p>3. Perhitungan penentuan ukuran pipa.</p> <p>4. Perhitungan kehilangan tekanan pada pipa.</p> <p>1. Daftar Gambar.</p> <p>2. Daftar simbol & singkatan.</p> <p>A. Sistem Pipa Tegak Hidran, Sprinkler Otomatis dan APAR:</p> <p>1. Diagram Sistem Pipa Tegak Hidran (dan sprinkler – <i>bila menerapkan sistem kombinasi</i>).</p> <p>2. Diagram Sistem Sprinkler Otomatis (tidak perlu dibuat terpisah – <i>bila menerapkan sistem kombinasi</i>).</p> <p>3. Skedul pompa kebakaran.</p> <p>4. Gambar tapak yang menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalur jalan/lintasan mobil PK b. Posisi Pillar Hidran kota c. Posisi Pillar Hidran halaman (<i>bila diperlukan</i>) d. Posisi parkir mobil PK e. Indikasi Jarak mobil PK ke Pillar Hidran f. Indikasi Jarak mobil PK ke Siamesse g. Jaringan pemipaan di tapak <p>5. Gambar-gambar denah yang menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Posisi Katup Landing 2,5 Inch b. Posisi Kotak Sambungan Selang Kebakaran 1,5 Inch c. Posisi Peletakan APAR. d. Katup Kendali Cabang sprinkler <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Masing-masing dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran coverage area. ii. Berlaku untuk seluruh lantai, untuk lantai tipikal cukup 1 gambar. <p>6. Gambar Lantai Dasar yang menunjukkan jalur-jalur evakuasi dan akses Petugas PK.</p> <p>7. Gambar Ruang Pompa dilengkapi skematik sistem pompa, sistem pengaman tekanan, skema kontrol operasi otomatis, catu daya listrik, dan lain-lain yang relevan.</p> <p>8. Gambar Kotak Sambungan Selang Kebakaran dan detail posisi pemasangannya.</p> <p>9. Tata Letak Pompa PK di Ruang Pompa, dilengkapi dengan detail.</p> <p>10. Diagram Sistem Catu Daya Listrik Pompa PK.</p> <p>11. Diagram Sistem Deluge Spinkler dan/atau PreAction Sprinkler (bila menerapkan sistem ini).</p> <p>12. Tata Letak Sistem tersebut di atas.</p> <p>13. Gambar-gambar lainnya sesuai kebutuhan untuk menjelaskan sistem ini .</p> <p>B. APAR :</p> <p>1. Tata Letak Penempatan APAR di setiap lantai (untuk lantai tipikal cukup 1 buah gambar) dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran coverage area.</p> <p>2. Detail Pemasangan APAR.</p> <p>C. Sistem Pemadam dengan bahan/zat aktif lainnya :</p> <p>1. Diagram Sistem.</p> <p>2. Tata Letak Sistem.</p> <p>3. Diagram Sistem Kontrol Operasi dan Sistem Pengamanannya.</p> <p>4. Gambar-gambar lainnya sesuai kebutuhan untuk menjelaskan sistem PK.</p>

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
5.	SISTEM LISTRIK ARUS KUAT DAN PENANGKAL PETIR kode: LAK	LINGKUP PEMERIKSAAN	
		1. Sistem Catu Daya Listrik	1. Sumber Daya meliputi Sumber Daya Utama dan Sumber Daya Cadangan. 2. Sistem Distribusi Tegangan Menengah. 3. Sistem Distribusi Tegangan Rendah termasuk Sistem Distribusi Daya dalam dan luar gedung. 4. Sistem UPS dan Distribusi Daya Listrik UPS.
		2. Sistem Pencahayaan buatan	1. Sistem Pencahayaan dalam gedung termasuk Pencahayaan dekorasi, Pencahayaan luar gedung dan pencahayaan rambu udara. 2. Sistem Pencahayaan dalam keadaan darurat.
		3. Sistem Pembumian	Meliputi : Instalasi Pembumian sistem disribusi daya dan pembumian pengaman.
		4. Sistem penangkal Petir	Meliputi : Instalasi Penangkap, Penghantar dan Pembumian.
		PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN	
		1. Peraturan yang harus ditaati	1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung (sedang dalam proses penyusunan). 5. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau (sedang dalam proses penyusunan). 6. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan PLN, unit Pemadam Kebakaran Bandung dan DEPNAKER.
		2. Standar yang menjadi acuan tata cara perencanaan	1. SNI 04-0255 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). 2. SNI 03-7013 Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung. 3. SNI 03-6575 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung. 4. SNI 03-6197 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Pada Bangunan Gedung. Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
		KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG	
		1. Laporan Kriteria Perencanaan	A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut. B. Sistem Catu Daya listrik : 1. Uraian Penjelasan tentang Sistem Penyediaan Listrik, meliputi : a. Sumber Daya Utama, Sumber Daya Cadangan, Sumber Daya Darurat dan Sumber Daya UPS. b. Konsep peralihan dari Sumber Daya Utama ke Sumber Daya Cadangan. c. Rumah trafo (power house). d. Konsep pengendalian Faktor Daya. e. Jenis-jenis beban & prioritas layanannya. f. Implementasi sistem supervisi/ monitoring yang diterapkan. g. Karakteristik sumber daya yang disyaratkan : Persyaratan tegangan, frekuensi dan keandalan. 2. Uraian penjelasan sistem Distribusi Tegangan Menengah [TM], meliputi : a. Sistem dan jenis Instalasi yang diterapkan. b. Jenis Pemutus Daya yang dipilih untuk Incoming, Metering, Beban & Outgoing. c. Sistem penghubung antara Pemutus Daya ke unit Transformer. d. Penjelasan tentang rumah gardu berikut Instalasi Panel Tegangan Menengah.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		<p>2. Lampiran Perhitungan</p>	<p>3. Uraian penjelasan sistem Distribusi Tegangan Rendah [TR], meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem dan jenis Instalasi yang diterapkan. b. Jenis peralatan pemutus daya yang dipilih untuk Incoming, Metering, Beban & Outgoing. c. Sistem penghubung antara Trafo Distribusi ke Pemutus Daya di Panel Induk Tegangan Rendah. d. Sistem penghubung antara Pemutus Daya di Panel Induk Tegangan Rendah ke sub panel distribusi. e. Penjelasan tentang ruang Panel Tegangan Rendah. f. Implementasi sistem supervisi/ monitoring yang diterapkan. <p>C. Sistem Pencahayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian penjelasan tentang kriteria tingkat kuat cahaya yang dipilih untuk tiap jenis ruangan. 2. Uraian tentang konsep pencahayaan alami & konsep pencahayaan buatan. 3. Uraian konsep penghematan enersi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan jenis-jenis lampu berikut armaturnya yang dipilih berikut uraian kuat cahayanya. b. Pola grouping dan penyalaaan lampu. c. Implementasi sistem penyalaaan lampu dengan sensor gerak. 4. Uraian sistem Pencahayaan Darurat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem yang diterapkan, sentral atau individual. b. Konsep aktivasi/penyalaaan lampu darurat dalam keadaan emergency. c. Titik-titik pencahayaan darurat sesuai dengan konsep evakuasi dalam keadaan darurat. <p>D. Sistem Pembumian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan konsep titik pembumian (<i>grounding</i>) untuk penyaluran : <ol style="list-style-type: none"> a. Arus Gangguan Hubung Singkat, Arus Bocor dan Residu Muatan. b. Arus petir sambaran tak langsung. c. Noise akibat harmonisa atau penyebab lainnya (<i>untuk keadaan yang tertentu dan yang khusus</i>). 2. Konsep titik pembumian (<i>grounding</i>) dan penyamaan tegangan (<i>equipotential bonding</i>) terkait dengan tegangan sentuh dan tegangan langkah. <p>E. Sistem Penangkal Petir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian penjelasan tentang konsep proteksi petir yang diterapkan. 2. Penetapan proteksi sambaran langsung & tidak langsung. 3. Jenis teknologi yang dipilih. 4. Alasan dari pemilihan teknologi yang dimaksud. <p>A. Sistem Catu Daya listrik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan kebutuhan daya listrik di bangunan gedung meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Beban normal. b. Beban gangguan. c. Beban keadaan darurat. 2. Neraca penggunaan daya & analisis dan perhitungan Faktor Daya. 3. Penentuan kapasitas sumber daya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber daya listrik utama. b. Sumber daya listrik cadangan. c. Sumber daya listrik dalam keadaan darurat.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		<p>3. Gambar-Gambar Perencanaan</p>	<p>4. Analisis dan perhitungan penghantaran listrik pada instalasi sumber daya, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan susut tegangan. Perhitungan untuk penentuan ukuran penghantar. Perhitungan arus hubung singkat. <p>5. Beban maksimum di setiap peralatan pemutus daya (sisi TM dan TR).</p> <p>6. Kemampuan hantar arus konduktor dan penetapan ukuran diameter kabel (sisi TM dan TR).</p> <p>7. Kemampuan hantar arus dan penetapan ukuran penampang Busbar (sisi TM dan TR).</p> <p>8. Arus hubung singkat fasa ke fasa dan fasa ke tanah.</p> <p>B. Sistem Pencahayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah titik lampu per ruangan sesuai dengan kriteria kuat penerangan di ruangan tersebut. Jumlah kebutuhan penggunaan daya untuk kebutuhan pencahayaan. Kekuatan batere untuk pencahayaan darurat. <p>C. Sistem Pembumian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahanan pembumian yang diperlukan untuk pengaman terhadap tegangan sentuh dan tegangan langkah. Perhitungan jumlah titik pembumian & ukuran penghantar untuk penyaluran arus gangguan pada Instalasi peralatan TM & Instalasi peralatan TR. Perhitungan untuk penentuan ukuran penghantar & titik pembumian untuk peralatan khusus. Perhitungan untuk penentuan ukuran Penghantar untuk penyamaan tegangan (<i>equipotential bonding</i>) antar badan peralatan. <p>D. Sistem Penangkal Petir :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penentuan Probabilitas arus Petir. Penetapan Manajemen Resiko dan penetapan konsep <i>Lightning Protection Zone (LPZ)</i> dari adanya bahaya petir. Perhitungan arus gangguan petir & penentuan jumlah titik pembumian. Penetapan ukuran & jenis hantaran penyalur petir. <p>1. Daftar Gambar.</p> <p>2. Daftar simbol & singkatan.</p> <p>A. Sistem Catu Daya listrik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Diagram Sistem Sumber Daya Listrik mencakup Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah. Riser Diagram Sistem Distribusi Daya Listrik di bangunan gedung. Gambar tapak yang menunjukkan posisi Gardu PLN, Jalur Kabel, posisi <i>Power House</i> untuk Tegangan Menengah & Tegangan Rendah. Gambar Denah Penyediaan Daya Listrik di setiap lantai (untuk lantai tipikal cukup 1 denah). Gambar Tabel Beban PHB untuk daya dan penerangan. <p>B. Sistem Pencahayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Denah/Tata Letak Lampu-lampu di setiap lantai, termasuk indikasi titik-titik Lampu Penerangan Darurat dan jalur evakuasi keadaan darurat (untuk lantai tipikal cukup 1 denah). Diagram Instalasi Pencahayaan & Pencahayaan Darurat (untuk lantai tipikal cukup 1 denah). <p>C. Sistem Pembumian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Diagram Sistem Pembumian. Gambar tapak yang menunjukkan titik-titik pembumian.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
			3. Detail Pembumian.
			D. Sistem Penangkal Petir :
			1. Diagram Sistem Penangkal Petir.
			2. Gambar Instalasi Penangkal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar menuju titik pembumian.
			3. Detail Penangkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabel penghantar.
6.	SISTEM LISTRIK ARUS LEMAH kode: LAL	LINGKUP PEMERIKSAAN	
		1. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran	1. Pusat kontrol dari Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran. 2. Instalasi Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran. 3. Peranan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat.
		2. Sistem Tata Suara	1. Pusat kontrol dari Sistem Tata Suara. 2. Sistem distribusi suara. 3. Sistem tata suara dalam keadaan darurat.
		3. Sistem Telepon	1. Sistem PABX yang digunakan (<i>bila ada</i>). 2. Sistem distribusi saluran ke pesawat telepon. 3. Sistem telpon nirkabel bila ada.
		4. Sistem CCTV dan Security	1. Pusat kontrol dari Sistem CCTV dan Sekuriti. 2. Sistem Kamera dan Deteksi Sekuriti dan instalasinya. 3. Peranan Sistem CCTV dalam keadaan darurat.
		5. Sistem Building Automation	1. Pusat kontrol BAS. 2. Titik-titik monitor dan kendali BAS. 3. Peranan Sistem BAS dalam keadaan darurat.
			PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN
		1. Peraturan yang harus ditaati	1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung (<i>sedang dalam proses penyusunan</i>). 5. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau (<i>sedang dalam proses penyusunan</i>). 6. Peraturan perundangan tentang Telekomunikasi. 7. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung dan TELKOM.
		2. Standar yang menjadi acuan tata cara perencanaan	1. SNI 03-3985 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
			KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG
		1. Laporan Kriteria Perencanaan	A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut. B. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran : 1. Uraian tentang dasar pemilihan sistem, antara lain : Pemilihan sistem deteksi (konvensional atau addressable), Pemilihan jenis alat deteksi (deteksi asap, temperatur atau laju kenaikan temperatur), Penentuan alat panggil manual, Penentuan jenis Alarm Audio dan Visual termasuk penjelasan tentang sumber daya untuk peralatan. 2. Dasar perhitungan dan asumsi-asumsi yang dipergunakan, antara lain jarak antar titik deteksi, luas zona alarm kebakaran, penentuan kuat sinyal audibel dan visual, Kapasitas catu daya dan perkabelan.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
			3. Detail Pembumian. D. Sistem Penangkal Petir : 1. Diagram Sistem Penangkal Petir. 2. Gambar Instalasi Penangkal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar menuju titik pembumian. 3. Detail Penangkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabel penghantar.
6.	SISTEM LISTRIK ARUS LEMAH kode: LAL	LINGKUP PEMERIKSAAN 1. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran 2. Sistem Tata Suara 3. Sistem Telepon 4. Sistem CCTV dan Security 5. Sistem Building Automation	1. Pusat kontrol dari Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran. 2. Instalasi Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran. 3. Peranan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat. 1. Pusat kontrol dari Sistem Tata Suara. 2. Sistem distribusi suara. 3. Sistem tata suara dalam keadaan darurat. 1. Sistem PABX yang digunakan (<i>bila ada</i>). 2. Sistem distribusi saluran ke pesawat telepon. 3. Sistem telpon nirkabel bila ada. 1. Pusat kontrol dari Sistem CCTV dan Sekuriti. 2. Sistem Kamera dan Deteksi Sekuriti dan instalasinya. 3. Peranan Sistem CCTV dalam keadaan darurat. 1. Pusat kontrol BAS. 2. Titik-titik monitor dan kendali BAS. 3. Peranan Sistem BAS dalam keadaan darurat.
		PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN	
		1. Peraturan yang harus ditaati 2. Standar yang menjadi acuan tata cara perencanaan	1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung (<i>sedang dalam proses penyusunan</i>). 5. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau (<i>sedang dalam proses penyusunan</i>). 6. Peraturan perundangan tentang Telekomunikasi. 7. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran dan TELKOM. 1. SNI 03-3985 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung. Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
		KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG	
		1. Laporan Kriteria Perencanaan	A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut. B. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran : 1. Uraian tentang dasar pemilihan sistem, antara lain : Pemilihan sistem deteksi (konvensional atau addressable), Pemilihan jenis alat deteksi (deteksi asap, temperatur atau laju kenaikan temperatur), Penentuan alat panggil manual, Penentuan jenis Alarm Audio dan Visual termasuk penjelasan tentang sumber daya untuk peralatan. 2. Dasar perhitungan dan asumsi-asumsi yang dipergunakan, antara lain jarak antar titik deteksi, luas zona alarm kebakaran, penentuan kuat sinyal audibel dan visual, Kapasitas catu daya dan perkabelan.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		<p>2. Lampiran Perhitungan</p>	<p>3. Uraian cara kerja sistem, meliputi penjelasan tentang bagian-bagian yang bekerja secara manual dan otomatis termasuk integrasi dengan sistem-sistem lainnya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sinyal ke Pos PK terdekat. Aktivasi Fan Penekan Saf PK. Aktivasi Sistem Darurat Kebakaran Sistem Elevator. Aktivasi Sistem Tata Udara dan Ventilasi darurat kebakaran. Konsep pemadaman Catu Daya Listrik ketika terjadi kebakaran. Bila gedung dilengkapi dengan sistem security (seperti <i>Access Control System</i> dan <i>CCTV System</i>) harus diuraikan keterkaitannya dengan fungsi sistem security serta titik-titik deteksi yang dimonitor oleh sistem security. Bila dipasang BAS (<i>Building Automation System</i>) harus diuraikan fungsi sistem deteksi yang dimonitor atau dikendalikan oleh BAS. Konsep komunikasi Voice yang diterapkan ketika terjadi kebakaran. <p>4. Jenis kabel dan peralatan yang dipergunakan.</p> <p>C. Sistem Tata Suara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian penjelasan sistem yang dipasang meliputi <i>Public Address System</i>, <i>Car Call</i> dan <i>Tata Suara Khusus</i>. Uraian cara kerja Sistem Tata Suara dalam keadaan operasi normal maupun keadaan darurat kebakaran. Dasar pemilihan & penentuan jenis-jenis <i>Speaker</i> yang dipasang. <p>D. Sistem Telepon :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian penjelasan sistem komunikasi telepon yang diterapkan. Uraian cara kerja Sistem Telepon dalam keadaan operasi normal maupun darurat kebakaran. Asumsi-asumsi untuk digunakan dalam perhitungan. Jenis-jenis telepon extension yang akan dipasang. Fungsi-fungsi tambahan (<i>features</i>) yang disediakan di <i>PABX</i>. Uraian tentang sistem telekomunikasi nirkabel yang disediakan (<i>bila ada</i>). <p>E. Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian penjelasan sistem CCTV dan Sekuriti yang direncanakan baik dalam keadaan operasi normal maupun operasi saat terjadi kebakaran. Uraian penjelasan ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan kamera CCTV dan detektor sekuriti. Jenis-jenis kamera dan detektor yang digunakan sesuai fungsi dan jenis ruangnya. Penetapan <i>Video Analytic</i> yang diterapkan dalam perekaman data melalui sistem CCTV Penetapan teknik kompresi, teknik perekaman dan dasar penetapan lama perekaman data yang direncanakan untuk dasar perhitungan kapasitas <i>Video Storage</i>. <p>F. Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian penjelasan sistem otomasi yang akan diterapkan di gedung ini. Uraian tentang protokol komunikasi intern sistem BAS dan komunikasi dengan sistem-sistem lainnya. Uraian kerja BAS mencakup hubungannya dengan sistem-sistem lainnya, termasuk hierarki dari BAS dalam hal integrasi dengan sistem-sistem lain yang terhubung dengan BAS, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat, terutama sistem <i>Catu Daya Listrik</i>, <i>Sistem PK</i>, <i>Sistem VAC</i> dan <i>Sistem Transportasi Vertikal</i>. <p>A. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :</p>

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		<p>3. Gambar-Gambar Perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan luas zona deteksi/loop. 2. Kapasitas catu daya dan pengkabelan. 3. Penentuan kuat suara sinyal alarm. 4. Penempatan panel utama dan panel pembantu serta letak ruang Pusat Kendali Kebakaran (FCC). <p>B. Sistem Tata Suara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Penentuan Noise Level ruangan, Kuat Suara & Daya speaker dan Distribusi Suara. 2. Perhitungan kebutuhan Daya Amplifier di sentral tata suara. 3. Perhitungan kapasitas catu daya, Kebutuhan baterai backup dan pengkabelan. <p>C. Sistem Telepon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>traffic</i> telekomunikasi dan perhitungan jumlah sambungan TELKOM. 2. Perhitungan jumlah extension dan kapasitas sentral telepon yang diperlukan. <p>D. Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan fokus per lensa yang dipilih. 2. Perhitungan jumlah kamera yang diperlukan dilengkapi dengan penetapan Field of View dan Depth of Field dari kamera yang dipilih serta kuat penerangan minimal dari obyek/area yang dipantau. 3. Perhitungan kapasitas sistem penyimpanan data sesuai teknik kompresi dan teknik perekaman yang ditetapkan. <p>E. Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan kebutuhan besaran kapasitas peralatan catu daya, baterai & perkabelan BAS. 2. Perhitungan (tabel) jumlah titik monitor dan titik kontrol dari BAS. <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Gambar. 2. Daftar simbol & singkatan. <p>A. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram skematik dan Riser Diagram sistem deteksi kebakaran, termasuk sistem pasokan daya listrik serta pengamannya. 2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan integrasi dengan sistem-sistem lain yang berkaitan dan menunjukkan posisi/lokasi Ruang Kendali Kebakaran (FCC: <i>Fire Command Control</i>) dan lokasi Ruang Pusat Peralatan Utama Sistem Deteksi Alarm Kebakaran. 3. Gambar tata letak titik deteksi dan alarm tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar). 4. Gambar pengkawatan (<i>wiring diagram</i>) peralatan sentral deteksi & alarm kebakaran 5. Gambar tata letak panel pengendali utama dan panel bantu, serta lokasi elektrode pembumiannya. <p>B. Sistem Tata Suara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram Sistem Tata Suara dan Riser Diagram sistem Tata Suara. 2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan. 3. Gambar tata letak titik Speaker tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar). 4. Gambar pengkawatan (<i>wiring diagram</i>) peralatan sentral Tata Suara dan panel bantu (terminal box) sebagai sarana antar muka Sentral Tata Suara dengan titik Speaker. <p>C. Sistem Telepon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram Sistem Telepon dan Riser Diagram sistem Telepon. 2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan. 3. Gambar tata letak titik Telepon tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
			4. Gambar pengkawatan (<i>wiring diagram</i>) peralatan sentral Telepon dan panel bantu (terminal box) sebagai sarana antar muka Sentral Telepon dengan titik telepon. D. Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security : 1. Diagram Sistem CCTV & Sekuriti yang mencantumkan jenis, tipe, kapasitas berikut konfigurasi yang diterapkan. 2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan. 3. Gambar tata letak kamera dan detektor tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar). E. Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) : 1. Diagram BAS dan Riser Diagram BAS yang mencantumkan jumlah titik-titik kontrol, monitor dan alarm berikut konfigurasi BAS master control yang diterapkan. 2. Gambar tata letak titik-titik monitor dan kontrol BAS tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
6.	SISTEM GAS MEDIK DAN GAS BAKAR kode: GAS	LINGKUP PEMERIKSAAN 1. Instalasi Gas Medis 2. Instalasi Gas Bakar	1. Sistem Gas Oksigen 2. Sistem Gas Nitrous Oxyde N2O 3. Sistem Vacuum/Suction 4. Sistem Gas lainnya 1. Sistem Gas Kota (CNG-Compressed natural gas) 2. Sistem Gas Elpiji (LPG-Liquefied petroleum gas)
		PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN	
		1. Peraturan yang harus ditaati 2. Standar yang menjadi acuan tata cara perencanaan	1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung. 4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung (sedang dalam proses penyusunan). 5. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PN Gas dan Depnaker. 1. SNI 16-6357-2000 Draft Pedoman Teknis Sistem Gas Medik dan Vakum Medik Rumah Sakit. 2. PN Gas: Petunjuk Instalasi Pipa Gas di Industri dan Komersil. Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
		KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG	
		1. Laporan Kriteria Perencanaan dan perhitungan teknik.	A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut. B. Sistem GAS MEDIK 1. Sistem penyediaan gas, uraian penjelasan cara kerja dan instalasinya. 2. Uraian penjelasan sistem pengamanan ruang penyimpanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliputi Sistem Pengamanan Pasif dan Sistem Pengamanan Aktif. 3. Kriteria tekanan tanki penyimpan/tabung, tekanan distribusi dan tekanan di Point of Use. 4. Perhitungan kebutuhan gas. 5. Bahan pipa distribusi dan uraian sistem instalasinya termasuk metoda penyambungan pipa. 6. Perhitungan kehilangan tekanan pada titik terjauh. 7. Perhitungan laju penguapan cairan dalam tanki gas terhadap kebutuhan gas di point of use. C. Sistem GAS BAKAR 1. Sistem penyediaan gas, uraian penjelasan cara kerja dan instalasinya.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
			2. Uraian penjelasan sistem langganan dan penempatan meter-meter gas (<i>bila menggunakan gas kota</i>). 3. Uraian penjelasan sistem pengamanan ruang penyimpanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliputi Sistem Pengamanan Pasif dan Sistem Pengamanan Aktif. 4. Kriteria tekanan tanki penyimpan/tabung, tekanan distribusi dan tekanan di Point of Use. 5. Perhitungan kebutuhan gas. 6. Bahan pipa distribusi dan uraian sistem instalasinya termasuk metoda penyambungan pipa. 7. Perhitungan kehilangan tekanan pada titik terjauh. 8. Perhitungan laju penguapan cairan dalam tanki gas terhadap kebutuhan gas di point of use.
		2. Gambar-Gambar Perencanaan	1. Daftar Gambar. 2. Daftar Simbol/Singkatan. A. Sistem GAS MEDIK. 1. Diagram Sistem Penyediaan dan Distribusi gas. 2. Gambar tapak yang menunjukkan lokasi ruang gas dan jalur akses pengisian tanki gas dan/atau penggantian botol gas. 3. Gambar denah pemipaan distribusi gas dalam gedung (untuk lantai tipikal cukup satu denah). 4. Gambar denah ruang simpan gas. 5. Gambar-gambar isometri dan lainnya. 6. Gambar detail sistem instalasi manifolding atau sistem Bulk Sotrage Tank (<i>tergantung mana yang digunakan</i>). 7. Gambar detail Point of Use. 8. Gambar Sistem Deteksi dan Alarm kebocoran dan Sistem Pengamanannya. 9. Detail tipikal pemasangan pipa gas. B. Sistem GAS BAKAR. 1. Diagram Sistem Penyediaan dan Distribusi gas. 2. Gambar tapak yang menunjukkan lokasi ruang gas dan jalur akses pengisian tanki gas dan/atau penggantian botol gas. 3. Gambar denah pemipaan distribusi gas dalam gedung (untuk lantai tipikal cukup satu denah). 4. Gambar denah ruang simpan gas. 5. Gambar-gambar isometri dan lainnya. 6. Gambar detail sistem instalasi manifolding atau sistem Bulk Sotrage Tank (<i>tergantung mana yang digunakan</i>). 7. Gambar detail Point of Use. 8. Gambar Sistem Deteksi dan Alarm kebocoran dan Sistem Pengamanannya. 9. Detail tipikal pemasangan pipa gas.
6.	SISTEM ² LAINNYA kode: MEP	LINGKUP PEMERIKSAAN 1. Sistem Genset 2. Sistem Boiler (<i>bila ada</i>)	1. Sisi Mekanikal. 2. Sisi Elektrikal. 3. Aliran Udara Intake dan Exhaust untuk Ventilasi, Radiator dan Pernapasan Mesin. 4. Peredaman Suara Ruang Genset. 5. Sistem Penyediaan Minyak Bakar.. 1. Sistem Boiler dan Kelengkapan Instalasinya a. Flue Gas Chimney, Safety Valve, dll. 2. Sistem Penyediaan Minyak Bakar.
		PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN	
		1. Peraturan yang harus ditaati	1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
		<p>2. Standar yang menjadi acuan tata cara perencanaan</p>	<p>2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.</p> <p>4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung (sedang dalam proses penyusunan).</p> <p>5. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PERTAMINA dan Depnaker.</p> <p>1. SNI 04-0255 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).</p> <p>2. Pedoman Tanki Bahan Bakar untuk Generator Darurat dan Boiler.</p> <p>Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.</p> <p>KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG</p> <p>1. Laporan Kriteria Perencanaan</p> <p>A. Sistem GENSET</p> <p>1. Uraian penjelasan sistem Genset, kapasitas, karakteristik pembebanan, rating dan kapasitas Genset.</p> <p>2. Uraian penjelasan sistem ventilasi dan sistem exhaust yang diterapkan pada saat non-operasi, saat operasi maupun pasca operasi.</p> <p>3. Uraian penjelasan konsep pengendalian kebisingan dan getaran yang diterapkan.</p> <p>4. Uraian penjelasan konsep pengendalian limbah dan drainase dalam ruang genset.</p> <p>5. Uraian penjelasan konsep pencegahan kebakaran.</p> <p>6. Uraian penjelasan sistem catu daya listrik sistem genset meliputi penjelasan Paraleling & Synchronizing genset, Automatic Starting, Automatic Load Transfer, dll.</p> <p>7. Uraian penjelasan konfigurasi sistem proteksi dan sistem supervisi & monitoring yang direncanakan.</p> <p>B. Sistem BOILER</p> <p>1. Uraian penjelasan sistem Boiler, kapasitas, karakteristik dan jenis bahan bakar yang dipilih.</p> <p>2. Uraian penjelasan sistem ventilasi dan sistem exhaust yang diterapkan.</p> <p>3. Uraian penjelasan konfigurasi sistem distribusi air panas, distribusi uap (untuk jenis ketel uap).</p> <p>4. Uraian penjelasan konsep pengendalian kebisingan dan getaran yang diterapkan.</p> <p>5. Uraian penjelasan konsep pengendalian limbah dan drainase dalam ruang Boiler.</p> <p>6. Uraian penjelasan konsep pencegahan kebakaran.</p> <p>7. Uraian penjelasan konfigurasi sistem proteksi dan sistem supervisi & monitoring yang direncanakan.</p> <p>2. Lampiran Perhitungan</p> <p>A. Sistem GENSET</p> <p>1. Sisi Mekanikal :</p> <p>a. Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penentuan Rating Sistem Genset.</p> <p>b. Perhitungan konsumsi bahan bakar dan penentuan kapasitas tanki-tanki bahan bakar.</p> <p>2. Sisi Elektrikal :</p> <p>a. Analisa arus hubung singkat untuk gangguan fasa- fasa atau fasa tanah.</p> <p>b. Pemilihan setting koordinasi dalam sistem proteksi yang diterapkan.</p> <p>B. Sistem BOILER</p> <p>1. Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penentuan Rating Sistem Boiler.</p> <p>2. Perhitungan konsumsi bahan bakar dan penentuan kapasitas tanki-tanki bahan bakar.</p> <p>3. Gambar-Gambar Perencanaan</p> <p>1. Daftar Gambar.</p> <p>2. Daftar Simbol/Singkatan.</p>

No.	Bidang	Dokumen yang diajukan	Kelengkapan isi dokumen
1	2	3	4
			<p>A. Sistem GENSET</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Letak Sistem Genset dan Sistem Kontrol Operasi Otomatis dan Daya. 2. Gambar sistem peredaman suara pada ruang genset. 3. Gambar saluran udara pendingin radiator dan detail saluran gas buang dan peredam suaranya. 4. Gambar instalasi tanki bahan bakar harian dan mingguan. 5. Gambar sistem dudukan peredam getaran mesin genset. 6. Gambar sistem penanganan limbah dan drainase dalam ruang Genset. 7. Gambar diagram Panel-Panel Kontrol dan Panel Listrik sistem Genset. 8. Gambar diagram Sistem Supervisi/ monitoring Genset. <p>B. Sistem BOILER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Letak Sistem Boiler dan Sistem Kontrol Operasi. 2. Gambar Sistem saluran udara/ventilasi dan saluran gas buang. 3. Gambar Sistem bahan bakar harian dan mingguan. 4. Gambar Blow Down Pit. 5. Gambar diagram instalasi tanki dan pemipaan air dingin, air panas, distribusi uap di ruang Boiler.

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN UTILITAS BANGUNAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan *Choose an item.*, untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan persetujuan dokumen rencana teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan :

Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

....., 20.....
 Sekretariat,
 Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.....

.....

Bagian – J

FORMAT JADWAL SIDANG TABG

JADWAL SIDANG TABG KABUPATEN FAKFAK

NO	NOMOR PENDAFTARAN	PERENCANA KONSTRUKSI	BANGUNAN GEDUNG			WAKTU PELAKSANAAN SIDANG			TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG				CATATAN PERBAIKAN	CATATAN TANPA PERBAIKAN (Centang apabila tidak ada perbaikan)
			FUNGSI	KLASIFIKASI	JUMLAH LANTAI	HARI/TANGGAL / TAHUN	JAM SIDANG	SIDANG KE	UNSUR PUPR/INSTANSI TEKNIS TERKAIT	UNSUR ASOSIASI PROFESI	UNSUR PERGURUAN TINGGI	UNSUR MASYARAKAT AHLI/MASYARAKAT ADAT		

KOP DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK

Nomor

TENTANG

SANSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG
KABUPATEN FAKFAK

KEPALA DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....TABG Ahli.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.sebagai TABG ahli.....tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 132 ayat 3 Peraturan Bupati Fakfak Nomor.....Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b, dan c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin teguran secara lisan dalam periode masa penugasannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
 6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran secara lisan kepada:

Nama :.....

Bidang Keahlian :.....

Unsur :.....

Jabatan :.....

Waktu Penugasan :.....

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Bupati Fakfak Nomor..... Tahun..... Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Kepala Dinas PUPR2KP Kabupaten
Fakfak

Tembusan:

1. Bupati Fakfak di Fakfak
2. Anggota TABG yang bersangkutan

Bagian – L

FORMAT SANKSI PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG

KOP DINAS PUPR2KP

KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP

KABUPATEN FAKFAK

Nomor

TENTANG

SANKSI PERINGATAN TERTULIS BAGI ANGGOTA TABG

KABUPATEN FAKAK

KEPALA DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK,

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....TABG Ahli.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. sebagai TABG ahli.....tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b, dan c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin peringatan secara tulisan dalam periode masa penugasannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
 6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan secara tulisan kepada:

Nama :.....
Bidang Keahlian :.....
Unsur :.....
Jabatan :.....
Waktu Penugasan :.....

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Kepala Dinas PUPR2 KP Kabupaten
Fakfak

Tembusan:

1. Bupati Fakfak di Fakfak;
2. Anggota TABG yang bersangkutan.

KOP DINAS PUPR2KP
KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP

KABUPATEN FAKFAK

Nomor

TENTANG

SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG KABUPATEN FAKFAK

KEPALA DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK,

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....TABG Ahli.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.sebagai TABG ahli.....tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan/ atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b, dan c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian sebagai anggota TABG dalam periode masa penugasannya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
 6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan secara tulisan kepada:

Nama	:.....
Bidang Keahlian	:.....
Unsur	:.....
Jabatan	:.....
Waktu Penugasan	:.....

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Kepala Dinas PUPR2KP
Kabupaten Fakfak

Tembusan:

1. Bupati Fakfak di Fakfak;
2. Anggota TABG yang bersangkutan

Bagian – N

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA
BAGI ANGGOTA TABG

KOP DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR2KP

KABUPATEN FAKFAK

Nomor

TENTANG

SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA BAGI
ANGGOTA TABG KABUPATEN FAKFAK

KEPALA DINAS PUPR2KP KABUPATEN FAKFAK,

- Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....TABG Ahli.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.sebagai TABG ahli.....dalam masa penugasannya: terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 132 ayat (6) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b, dan c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian sebagai TABG dan dikeluarkan dari basis data ahli bangunan gedung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 014);
 6. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai TABG dan dikeluarkan dari basis data ahli bangunan gedung kepada:

Nama :.....
Bidang Keahlian :.....
Unsur :.....
Jabatan :.....
Waktu Penugasan :.....

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik, dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (6) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Kepala Dinas PUPR2KP
Kabupaten Fakfak

Tembusan:

1. Bupati Fakfak di Fakfak;
2. Anggota TABG yang bersangkutan

Bagian – O

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

TABEL BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi : **Status tanggal** :
Kabupaten/ Kota : **penanggung jawab** :

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIS	DATA UMUM •Tempat Lahir •Tanggal Lahir •Alamat Rumah	UNSUR •Perguruan Tinggi •Asosiasi Profesi •Masyarakat Ahli •Masyarakat Adat	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	IJAZAH TERAKHIR •Nama Perguruan Tinggi •Nama Lembaga, dsb.	DITETAPKAN SEBAGAI TABG •Tanggal	STATUS	
							PENUGASAN SEBAGAI TABG •Tanggal	PEMBERHENTIAN DARI TABG •Tanggal •Alasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
 NIP. 19611211 198908 1 002

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Bagian - O

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

TABEL BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi : Status tanggal :
 Kabupaten/ Kota : penanggung jawab :

NO	: DAN MIS	DATA UMUM •Tempat Lahir •Tanggal Lahir •Alamat Rumah	UNSUR •Perguruan Tinggi •Asosiasi Profesi •Masyarakat Ahli •Masyarakat Adat	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	IJAZAH TERAKHIR •Nama Perguruan Tinggi •Nama Lembaga, dsb.	DITETAPKAN SEBAGAI TABG •Tanggal	STATUS	
							PENUGASAN SEBAGAI TABG •Tanggal	DARI TABG •Tanggal •Alasan

1									9

CATAT Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUSTHINUS RIRUMA, SH
 NIP. 19611211 198908 1 002

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Lampiran III : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 28 Tahun 2017
Tanggal 31 Agustus 2017

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN SLF

- Bagian - A FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF
- Bagian - B FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN
PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA
- Bagian - C FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN
PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA
DAN KHUSUS
- Bagian - D FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN
PENERBITAN SLF BANGUNAN PRASARANA

Bagian – A

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF

No :

Hal : Permohonan Sertifikat Laik Fungsi

Kepada:

Yth. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Fakfak
di
Fakfak

Dengan Hormat,
Bersama ini saya mengajukan permohonan:

() SLF Pertama

() SLF Perpanjangan*)

DATA PEMOHON

Nama Pemohon : _____
(Nama Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)
Alamat Pemohon : _____
(Alamat Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)
No. Telepon/ HP : _____

dan saya lampirkan persyaratan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yaitu:

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. () Surat Permohonan di atas kop instansi/ perusahaan bagi badan usaha yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Instansi/ Perusahaan (Materai6000);
2. () Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang dikuasakan
3. () Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. () Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. () Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha;
6. () Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah,
7. () Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan;
8. () Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah;
9. () Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik Fungsi dari Pengawas/ Manajemen Konstruksi/ Pengkaji Teknis;
10. () Data Penyedia Jasa Perencana;
11. () Data Penyedia Jasa Pelaksana;
12. () Data Penyedia Jasa Pengawas/ Manajemen Konstruksi
13. () Data Penyedia Jasa Pengkaji Teknis

II. PERSYARATAN TEKNIS

14. () Data Umum Bangunan Gedung/ Prasarana;
15. () Fotokopi IMB bagi SLF pertama; () Fotokopi IMB dan SLF awal bagi SLFn*)
16. () Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*)
17. () 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit
18. () Gambar (*As built drawing*) hasil pelaksanaan;
19. () Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;
20. () Laporan *Testing Commisioning/* Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi;

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

**KABUPATEN FAKFAK****No** :**Tanggal** :**Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Surat Permohonan di atas kop instansi atau perusahaan bagi yang berbadan usaha yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Instansi/ Perusahaan (Materai 6000)			
2	Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang dikuasakan			
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon			
4	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
5	Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha			
6	Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah			
7	Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan;			
8	Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah;			
9	Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik Fungsi dari Pengawas/ Manajemen Konstruksi/ Pengkaji Teknis			
10	Data Penyedia Jasa Perencana;			
11	Data Penyedia Jasa Pelaksana;			
12	Data Penyedia Jasa Pengawas/ Manajemen Konstruksi			
13	Data Penyedia Jasa Pengkaji Teknis			
CATATAN:				

Pemeriksa

NIP:



KABUPATEN FAKFAK

No :
Tanggal :

Formulir

SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini,

Penyedia jasa Pengawasan/MK/instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung*

1. Nama penanggung jawab :
2. Nama perusahaan/instansi teknis* :
telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

A. Bangunan gedung

1. Fungsi utama :
2. Fungsi tambahan :
3. Jenis bangunan gedung :
4. Nama bangunan gedung :
5. Nomor pendaftaran bangunan gedung :

B. Lokasi bangunan gedung

1. Alamat lokasi terletak di :
2. Kelurahan/Kampung :
3. Distrik :
4. Kabupaten :
5. Provinsi :

C. Permohonan

- () Penerbitan SLF () Perpanjangan SLF ke:

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Persyaratan administratif () Terpenuhi () Tidak Terpenuhi

Catatan:

2. Persyaratan teknis () Terpenuhi () Tidak Terpenuhi

Catatan:

3. Kesesuaian fungsi bangunan gedung () Sesuai () Tidak Sesuai
4. Kesesuaian peruntukan lahan () Sesuai () Tidak Sesuai

5. Tata bangunan sudah memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bangunan

() Sudah memenuhi () Belum memenuhi

Catatan:

6. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/Tidak laik fungsi* sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Dengan pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung ini, Penyedia Jasa Pengawasan/MK menyatakan ikut bertanggung jawab atas kegagalan bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan umur konstruksi.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna. Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan penerbitan SLF.

.....,.....20.....

(Materai, stempel)

Penyedia Jasa Pengawasan/MK/Petugas Pemda*

Selaku Penanggung Jawab

Disetujui

Pemerintah Kabupaten Fakfak
Dinas PUPR2KP

Bagian - B

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA



KABUPATEN FAKFAK

No :

Tanggal :

Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Umum Bangunan Gedung			
2	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3	Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*			
4	1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit			
5	Gambar (<i>As built drawing</i>) hasil pelaksanaan;			
6	Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;			
7	Laporan <i>Testing Commisioning</i> / Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi			

CATATAN:

Pemeriksa

NIP:

Bagian - C

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS



KABUPATEN FAKFAK

No :

Tanggal :

Formulir

**PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Umum Bangunan Gedung			
2	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3	Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*			
4	1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit			
5	Gambar (<i>As built drawing</i>) hasil pelaksanaan;			
6	Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;			
7	Dokumen Pemeriksaan Kelaikan Fungsi			

CATATAN:

Pemeriksa

NIP:

Bagian - D

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN PRASARANA



KABUPATEN FAKFAK

No :

Tanggal :

Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN PRASARANA

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Umum Bangunan Gedung			
2	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3	Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*			
4	1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit			
5	Gambar (<i>As built drawing</i>) hasil pelaksanaan;			
6	Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;			
7	Laporan <i>Testing Commisioning</i> / Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi			
CATATAN:				

Pemeriksa

NIP:

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002

Bagian - D

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN PRASARANA



KABUPATEN FAKFAK

No :
Tanggal :

Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN PRASARANA

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Umum Bangunan Gedung			
2	Fotokopi IMB			
	Fotokopi IMB dan SLF*			
3	Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*			
4	1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit			
5	Gambar (<i>As built drawing</i>) hasil pelaksanaan;			
6	Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPSTP;			
7	Laporan <i>Testing Commissioning</i> / Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi			

CATATAN:

Pemeriksa

NIP:

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
NIP. 19611211 198908 1 002